

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

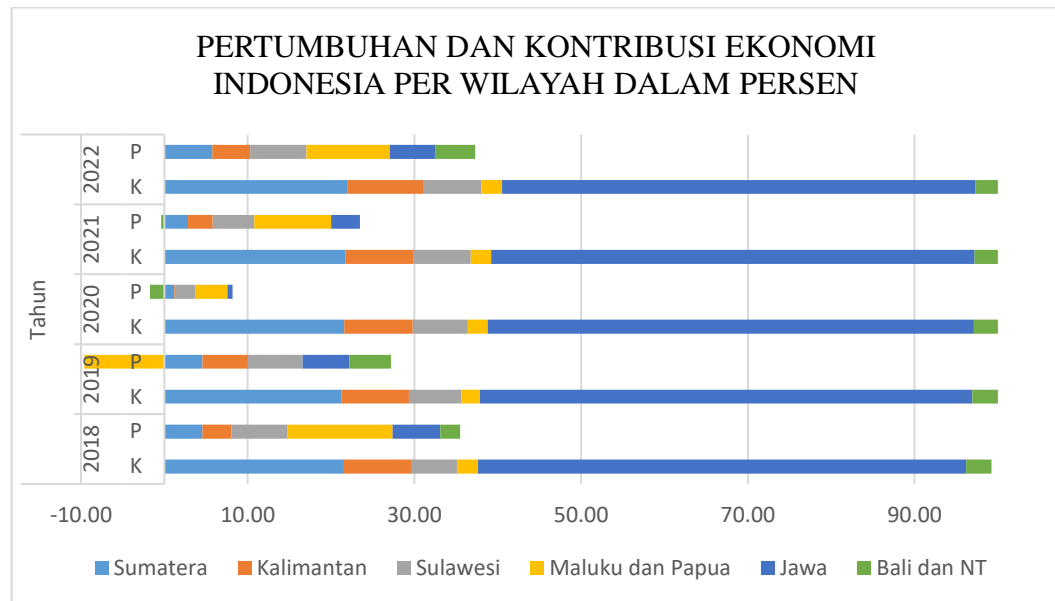
Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mencapai perekonomian yang berkelanjutan dan seimbang di Indonesia. Pembangunan ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun juga untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Beberapa faktor yang dapat berperan penting dalam pembangunan ekonomi daerah yaitu investasi, tingkat teknologi dan indeks pembangunan manusia. Penanaman modal dalam dan luar negeri merupakan sumber daya penting yang dapat mengembangkan perekonomian daerah. Dengan lebih banyak investasi, daerah dapat mengakses modal yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja.

Investasi tersebut juga dapat mencakup transfer teknologi dan pengembangan keterampilan tenaga kerja lokal, yang semuanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Tingkat teknologi, termasuk penggunaan teknologi informasi (TIK) dan inovasi teknologi lainnya, merupakan indikator penting kesiapan daerah untuk bersaing dalam perekonomian global. Daerah yang berketerampilan tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi, efisiensi proses bisnis yang lebih besar, dan kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak produk dan layanan yang bernilai tambah. Teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan membuka peluang baru dalam perekonomian, seperti e-commerce dan industri kreatif. Hal ini sesuai

dengan teori Solow yang mementingkan adanya teknologi sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan indeks komprehensif yang mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. IPM yang tinggi menunjukkan bahwa suatu daerah berhasil tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan, pendidikan berkualitas dan pendapatan yang baik merupakan faktor penting yang membantu masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi tujuan penting dalam strategi pembangunan ekonomi daerah. Adanya interaksi antara investasi, indeks teknologi dan IPM diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekonomi Indonesia

Diketahui Pulau Jawa sampai saat ini masih menjadi pusat perekonomian Indonesia yang terdiri dari 6 provinsi yaitu Banten, D.I Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Meskipun masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa rata-rata kontribusi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 58,16 persen pada periode tahun 2018-2022, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,17 persen per tahun. Namun, perbandingan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa relatif lebih rendah.



Sumber: *Website BPS*

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Indonesia Per Wilayah dalam Persen

Dilihat dari gambar di atas, setiap tahunnya kontribusi ekonomi Indonesia didominasi oleh Pulau Jawa, sedangkan persentase pertumbuhan ekonomi didominasi oleh pulau Maluku dan Papua walaupun pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang negatif, itu dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengganggu rantai pasokan dan membuat daya beli menjadi menurun. Hal ini dapat disebabkan oleh stok sumber daya alam di Pulau Jawa yang semakin menipis, sehingga potensi pemanfaatan sumber daya alamnya semakin berkurang.

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik oleh Robert Solow memberikan wawasan yang berguna tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Solow menekankan pentingnya teknologi sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi. Di Pulau Jawa, kemungkinan rendahnya pertumbuhan ekonomi juga bisa disebabkan oleh kurangnya inovasi dan kemajuan

teknologi yang memadai, terutama dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang semakin menipis.

Dalam konteks ini, pentingnya investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi menjadi sangat relevan. Teori Solow menekankan bahwa pengembangan teknologi dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Bayu Wijayanto, 2019). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang menghasilkan inovasi dan pengembangan teknologi di Pulau Jawa bisa menjadi strategi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting untuk menilai perekonomian dan mengukur seberapa efektif pembangunan ekonomi di suatu negara atau wilayah. Salah satu cara untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara adalah dengan melihat nilai Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian di tingkat daerah atau regional. Pertumbuhan ekonomi regional merupakan acuan untuk pembangunan ekonomi daerah karena dapat menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi daerah. Ini adalah salah satu indikator penting dalam menilai kondisi perekonomian. Dalam buku yang ditulis oleh Presetyani dan Sumardi dijelaskan jika nilai PDRB suatu daerah meningkat, maka itu menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut dan sebaliknya (Presetyani, 2020:11).

**Tabel 1.1 Nilai Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di
Pulau Jawa (Miliar Rupiah)**

PROVINSI	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
BANTEN	433782.71	456620.03	441148.58	460963.02	484141.83
DI YOGYAKARTA	98024.01	104485.46	101698.52	107372.56	112898.32
DKI JAKARTA	1735208.29	1836240.55	1792291.09	1856075.82	1953455.85
JAWA BARAT	1419624.14	1490959.69	1453380.72	1507746.39	1589984.93
JAWA TENGAH	941091.14	991516.54	965227.27	997345.05	1050322.13
JAWA TIMUR	1563441.82	1649895.64	1611392.55	1668749.44	1757821.43

Sumber : website Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai PDRB Provinsi di Pulau Jawa selalu meningkat setiap tahun. DKI Jakarta selaku Ibu Kota Indonesia memiliki kontribusi PDRB yang paling besar dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dengan nilai tertinggi pada tahun 2022 mencapai Rp 1.953.455,85 miliar. Disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai tertinggi mencapai Rp 1.757.821,43 miliar. Pada urutan ketiga diduduki oleh Provinsi Jawa Barat dengan nilai tertinggi mencapai Rp 1.589.984,93 miliar. Kemudian pada urutan keempat diduduki oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai tertinggi mencapai Rp 1.050.322,13 miliar. Selanjutnya, urutan kelima diduduki oleh Provinsi Banten dengan nilai tertinggi mencapai Rp 484.141,83 miliar. Dan urutan terakhir diduduki oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan nilai tertinggi mencapai Rp 112.898,32 miliar.

Perekonomian yang masih berpusat di Pulau Jawa dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia, perdagangan, sampai teknologi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Paul Romer yaitu pertumbuhan ekonomi endogen (*endogenous economic growth*) adalah model ekonomi yang mengoptimalkan potensi internal negara. Model ini mengutamakan sumber daya

manusia dengan kekuatan ilmu pengetahuan, sumber daya alam, aset teknologi, dan kelembagaan untuk menjadi modal utama dalam peningkatan produksi dan juga ekonomi nasional. Bahkan menurut pernyataan Todaro dan Smith (2011:170) kemajuan teknologi menjadi salah satu komponen pertumbuhan ekonomi. Faktor teknologi akan mendorong suatu negara atau wilayah menyediakan barang dan jasa secara lebih efisien serta meningkatkan daya saing usaha. Begitu pun dengan teori yang dikeluarkan oleh Robert Solow dalam pertumbuhan neo-klasik menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu jumlah penduduk, tenaga kerja, dan teknologi.

Berdasarkan data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), indikator kesiapan teknologi dibagi menjadi lima indeks, antara lain indeks infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, indeks keterampilan teknologi, indeks penelitian bidang teknologi, indeks kemampuan industri dalam mengadopsi teknologi, dan indeks ketersediaan pembiayaan bagi sektor swasta. Adapun indeks infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia menurut data BPS cenderung positif hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi cenderung meningkat setiap tahunnya ditambah adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2019 mengubah perilaku masyarakat dengan mengubah aktivitas sehari-hari menjadi daring melalui berbagai *platform* digital. Mulai dari sekolah, berbelanja kebutuhan rumah, hingga bekerja. Hal ini mendorong peningkatan penggunaan teknologi secara masif di masyarakat.

Tabel 1.2 Indeks Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

PROVINSI	TAHUN					RATA-RATA
	2018	2019	2020	2021	2022	
BANTEN	5.25	5.89	5.99	5.90	6.29	5.86
DI YOGYAKARTA	4.81	6.91	7.09	5.64	7.25	6.34
DKI JAKARTA	4.88	7.31	7.46	5.85	7.64	6.62
JAWA BARAT	6.14	5.86	6.00	6.58	6.16	6.14
JAWA TENGAH	7.14	5.50	5.74	7.66	5.83	6.37
JAWA TIMUR	5.63	5.49	5.73	6.08	5.91	5.76

Sumber : website Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa indeks TIK mengalami laju yang fluktuatif dan secara rata-rata Provinsi DKI Jakarta memiliki indeks TIK tertinggi dibanding provinsi lain dengan nilai sebesar 6,62. Artinya, Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi DKI Jakarta lebih mumpuni dibanding dengan provinsi lainnya. Disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata indeks TIK sebesar 6,37. Lalu posisi ketiga ditempati oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan rata-rata indeks sebesar 6,34. Kemudian secara berturut-turut yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur dengan indeks 6,14, 5,86, dan 5,76. Jika dibandingkan dengan nilai rata-rata indeks Indonesia pada tahun 2018-2022 yaitu sebesar 5,52 indeks setiap provinsi di Pulau Jawa sudah cukup baik karena melebihi indeks rata-rata nasional.

Belum banyak peneliti yang meneliti secara langsung pengaruh Infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi terhadap PDRB khususnya di Pulau Jawa. Padahal perkembangan teknologi informasi berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi. Produksi tenaga kerja, produktivitas kapital, dan produktivitas lainnya dapat meningkat sebagai hasil dari kemajuan teknologi.

Teknologi memengaruhi tingkat output dalam kegiatan produksi, sehingga memengaruhi total produksi domestik regional, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Selain menjadi pusat perekonomian, Pulau Jawa juga dinobatkan sebagai pulau dengan penduduk terpadat di dunia berdasarkan data dari World Economic Forum (WEF), kepadatan penduduk di Pulau Jawa tercatat sebesar 1.015,9 jiwa per kilometer persegi (km²) pada 2021. Sedangkan luas daerah di Pulau Jawa hanya sebesar 138.793 km². Sementara, jumlah penduduk di pulau tersebut diperkirakan mencapai 141 juta jiwa. Keberhasilan suatu pembangunan sangat bergantung pada kondisi penduduknya, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas dapat berpotensi menunjang keberhasilan pembangunan ekonomi.

Penduduk yang berkualitas dapat tercermin dari tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakatnya karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka diharapkan dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap proses produksi. Begitu pun dengan tingkat kesehatan masyarakatnya, kesehatan yang baik dapat mendukung partisipasi yang baik dalam pendidikan dan diharapkan dapat fokus di setiap proses pembelajaran sehingga akan melahirkan lulusan yang berkualitas.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

PROVINSI	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
BANTEN	71.95	72.44	72.45	72.72	73.32
DI YOGYAKARTA	79.53	79.99	79.97	80.22	80.64
DKI JAKARTA	80.47	80.76	80.77	81.11	81.65
JAWA BARAT	71.30	72.03	72.09	72.45	73.12
JAWA TENGAH	71.12	71.73	71.87	72.16	72.79
JAWA TIMUR	70.77	71.50	71.71	71.14	72.75

Sumber : website Badan Pusat Statistik

Dari tabel di atas diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) setiap provinsi di Pulau Jawa selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Provinsi DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks tertinggi yaitu sebesar 81,65. Posisi kedua yaitu DI Yogyakarta dengan indeks sebesar 80,64. Posisi ketiga Provinsi Banten sebesar 73,32. Lalu Provinsi Jawa Barat sebesar 73,12. Kemudian secara berturut-turut Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 72,79 dan 72,75. Nilai IPM memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan manusia di suatu negara atau wilayah dilihat dari tiga sub penilaian yaitu rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan daya beli masyarakat.

Proses pembangunan ekonomi yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia merupakan suatu upaya berkelanjutan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan prinsip Pancasila dan Undang-Undang 1945. Salah satu fokus pembangunan nasional saat ini terletak pada pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, terdapat kendala dalam bentuk keterbatasan sumber daya, terutama tercermin pada tingkat tabungan nasional yang masih tergolong rendah.

Dalam mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia mengakui bahwa salah satu langkah kunci adalah peningkatan investasi. Menurut Nuraini (2005:238), investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau pendapatan di masa yang akan datang. Meskipun upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah menjadi fokus, kekurangan dana yang signifikan untuk pembangunan membutuhkan solusi kreatif. Oleh karena itu, strategi yang diambil adalah mendorong peningkatan investasi baik dari sektor domestik maupun asing. Hal ini diharapkan tidak hanya dapat mengatasi keterbatasan sumber daya, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi perkembangan sektor-sektor ekonomi yang strategis.

Tabel 1.4 Nilai Investasi Dalam Negeri (dalam miliar rupiah)

PROVINSI	TAHUN					RATA-RATA
	2018	2019	2020	2021	2022	
BANTEN	18637.6	20708.4	31145.7	25989.5	31283.9	25553.02
DI YOGYAKARTA	6131.7	6298.8	2683.4	2761.3	2275	4030.04
DKI JAKARTA	49097.4	62094.8	42954.7	54708.2	89223.6	59615.74
JAWA BARAT	42278.2	49284.2	51400.5	59948.5	80808.3	56743.94
JAWA TENGAH	27474.9	18654.7	30606.1	31311.2	24992.3	26607.84
JAWA TIMUR	33333.1	45452.7	55660.6	52552.2	65355.9	50470.9

Sumber : website Badan Pusat Statistik

Pada tabel di atas diketahui bahwa nilai investasi dalam negeri di provinsi di Pulau Jawa mengalami laju yang fluktuatif. Secara rata-rata Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai investasi tertinggi dibanding provinsi lain dengan nilai sebesar Rp 59.615,74 miliar. Disusul oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata nilai investasi sebesar Rp 56.743,94 miliar. Lalu posisi ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata nilai investasi sebesar Rp 50.470,9 miliar. Kemudian secara

berturut-turut yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, dan DI Yogyakarta dengan nilai investasi sebesar Rp 26.607,4 miliar, Rp 25.553,02 miliar, dan Rp 4.030,04 miliar.

Investasi menjadi kunci utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang kondusif dan menarik bagi pelaku bisnis. Langkah-langkah kebijakan yang mungkin dapat diterapkan untuk merangsang pertumbuhan investasi, termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan infrastruktur, dan insentif fiskal. Dengan demikian, diharapkan bahwa peningkatan investasi akan memberikan dampak positif bagi pembangunan ekonomi nasional, mengatasi keterbatasan sumber daya, dan mengarahkan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam mempengaruhi nilai produk domestik regional bruto provinsi di Pulau Jawa.

Berdasarkan fenomena dan belum banyaknya penelitian yang meneliti variabel di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 6 provinsi di Pulau Jawa yaitu Provinsi Banten DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel dependen yaitu indeks teknologi informasi dan komunikasi (TIK), indeks pembangunan manusia, investasi dan variabel independen yaitu produk domestik regional bruto dengan judul penelitian “Pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi

dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022?
2. Diantara variabel Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi manakah yang lebih mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022?
3. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022?

2. Untuk melihat diantara Variabel independen manakah yang lebih dominan mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022?
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Investasi secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Di Pulau Jawa Tahun 2018-2022?

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut di bidang yang relevan. Penelitian-penelitian mendatang dapat menambahkan variabel-variabel lain, menggali lebih dalam interaksi antar variabel, atau memperluas cakupan geografis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan wawasan pertumbuhan ekonomi terkait dengan perkembangan TIK, IPM, dan Investasi.
- b. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Pengaruh infrastruktur TIK, IPM, dan investasi terhadap PDRB.
- c. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah, terkait pentingnya meningkatkan infrastruktur

